

## BAB II DASAR SOSIOLOGIS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Seorang sosiolog terkemuka mengatakan bahwa pendidikan tidak pernah berlangsung dalam suatu keadaan suatu vakum atau ruang yang kosong. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu masyarakat tertentu.

Mempelajari pendidikan tidak dapat dilangsungkan tanpa memperhatikan keadaan kemasyarakatan di mana pendidikan tersebut berlangsung. Berbagai aspek dari masyarakat tersebut perlu dipelajari, sebab aspek-aspek dari kehidupan sosial tersebut memberikan landasan, garis dan corak serta arah dari pendidikan itu. Philips Coombs (1983) mengatakan bahwa suatu sistem pendidikan mendapatkan input atau masukan dari masyarakat yang merupakan suprasistemnya, dan mempersembahkan output atau hasilnya bagi kepentingan masyarakat tersebut pula. Tiga kelompok input yang ditimba suatu sistem pendidikan dari masyarakatnya :

- a. Nilai dan pengetahuan, yang menggariskan tujuan pendidikan serta konten atau isi dari pendidikan tersebut ;
- b. Faktor manusia yang menyediakan guru serta siswanya ;
- c. Faktor ekonomi, yang menyediakan anggaran serta sarannya.

Selanjutnya sistem pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan manusia yang lebih siap hidup dan menyumbangkan darmanya bagi kehidupan masyarakat tersebut, baik sebagai anggota masyarakat biasa, sebagai pimpinan masyarakat, sebagai kepala keluarga dan sebagainya, baik dalam bentuk pengetahuan yang dimilikinya, ketrampilan yang dikuasainya serta sikap hidup yang melandasi perbuatannya.

Apabila pendapat para tokoh di atas disimak, maka untuk mempelajari kelangsungan pendidikan di Indonesia perlu kita mengkaji setidaknya sistem nilai yang berlaku di Indonesia, faktor menusiawinya, mencakup di antaranya masalah kependudukan, masalah mobilitas serta struktur masyarakat Indonesia, dan aspek ekonomis yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan anggaran bagi pendidikan.

I. Nilai dan ilmu sebagai input sistem pendidikan.

Sistem nilai yang melandasi pendidikan di Indonesia bersumber pada Pancasila. Dalam bagian ini akan dicoba diadakan sekadar pengamatan mengenai berbagai nilai yang secara nyata hidup di Indonesia, yang karenanya harus diperhatikan dalam pemikiran dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Perhatikan pertama tertuju kepada gotong royong sebagai suatu nilai yang sudah terdapat di bumi Indonesia sejak

dahulu. Para budayawan dan sejarawan mendasarkan pendapat ini melalui analisis kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Seperti dikemukakan pada bagian lain, ternyata kedatangan para pendatang dari luar, membawakan pula pengaruhnya pada sistem nilai di Indonesia. Kuncaraningrat mengemukakan bahwa di antara abad keempat sampai abad ketujuh masuk pengaruh agama Hindu, agama Budha bersama kesusasteraan, filsafat dan beberapa unsur keseniannya, pada abad ketujuh belas sampai abad kedua puluh masuk agama kristen, sistem pendidikan formal dari Eropa Barat, khususnya sistem pendidikan Belanda, juga filsafat, ilmu pengetahuan/ sains dan teknologi, asas-asas dan konsep ekonomi, berbagai bahasa Eropa, kesusasteraan, seni rupa, seni suara, dan arsitektur Eropa Barat. Masuknya berbagai pengaruh dari luar itu tidak berlangsung sepihak, akan tetapi terjadi semacam dan menerima: artinya apa yang datang dari luar itu tidak ditelan mentah-mentah, akan tetapi diselaraskan dengan apa yang ada Indonesia. Oleh karena itu kata Van Leux pengaruh dari luar itu bagai selaput tipis yang membungkus kebudayaan dan sistem nilai yang asli dan kokoh. Sehubungan dengan masuknya pengaruh dari luar itu Ki Hajar Dewantara mengatakan, bahwa pengaruh dari luar itu boleh saja diterima sepanjang tidak merusak kebudayaan asli kita.

Meningkatnya teknologi komunikasi akhir-akhir ini, meningkatkan pula derasnya pengaruh dari luar itu. Beberapa unsur dari kebudayaan Barat memang telah ada yang terintegrasi dengan kebudayaan Indonesia, khususnya melalui sistem pendidikan formal dari Belanda dan kadang-kadang tidak lagi dirasakan sebagai unsur kebudayaan asing. Akan tetapi tidak berarti bahwa kita tidak waspada terhadap kemungkinan munculnya pengaruh yang negatif terhadap kebudayaan Indonesia. Kuncaraningrat mengemukakan, bahwa sehubungan dengan ini kita hendaknya tidak sampai hanya memberantas gejala-gejala lahirnya saja, melainkan kewaspadaan itu hendaknya diarahkan pula terhadap dasar dan landasan gejala tersebut, seperti misalnya sikap dan alam pikiran individualisme serta kebebasan individu yang ekstrim. Diingatkannya bahwa alam pikiran seperti itu telah mulai merembes ke tengah-tengah kita, sejajar dengan modernisasi serta pergeseran kebudayaan dari peradaban agraris ke peradaban industri.

Dalam menghadapi peradaban dunia dengan kebudayaan industri seperti dikemukakan di atas, Kuncaraningrat menganjurkan pertama-tama keharusan peningkatan disiplin nurani sendiri dalam arti sikap yang mampu mengendalikan diri selaras dengan nilai yang diakui sendiri, sehingga pelaksanaan nilai-nilai yang baik itu

tidak dilakukan semata-mata karena takut pihak lain, melainkan atas dasar kesadaran sendiri. Dengan perkataan lain, nilai-nilai seperti disinggung di atas hendaknya mendarah daging pada pribadi yang bersangkutan dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang disodorkan atau dipaksakan oleh orang lain. Dan pendidikan akan banyak sahamnya terhadap usaha personalisasi nilai ini.

Di samping itu sikap hidup gotong royong, sikap rukun dan menyatu dengan alam yang oleh S. Kalapaking disebut sebagai sikap dasar manusia Indonesia itu hendaknya diselaraskan dan dimanfaatkan bagi kehidupan dewasa ini. Dan untuk dapat terus bertahan dalam gejolak kehidupan dan perubahan dewasa ini diperlukan penguasa dalam berbagai bidang peradaban dunia masakini, di antaranya ditunjukkan Kuncaraningrat: teknologi, sains, filsafat, kebijaksanaan ekonomi, sistem administrasi dan organisasi media massa dan sistem pendidikan.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini sangat pesat. Demikian pesatnya sehingga pengaruhnya terasa benar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, khususnya oleh para budayawan dan ahli pendidikan. Perlu penguasaan ilmu pengetahuan yang sedang deras maju itu, sebab "bila kita diam, berarti mundur" kata salah seorang tokoh. Akan tetapi seperti dikemukakan,

kita perlu waspada terhadap akses-aksesnya yang negatif. Ilmu dan teknologi hendak menjadi alat bagi kehidupan manusia, dan jangan sebaliknya sehingga manusia menjadi alat dari ilmu dan teknologi. Jadi dunia pendidikan hendaknya memperhatikan dan meningkatkan penguasaan kita terhadap dunia ilmu dan teknologi itu, dan sekaligus menanamkan sikap yang tepat terhadapnya, sehingga pribadi manusia tidak menjadi bulan-bulanan darinya.

Demikian sistem nilai dan ilmu merupakan input yang benar-benar harus diperhitungkan bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

II. Aspek manusia sebagai input sistem pendidikan

Dalam Undang-undang Dasar 45 pasal 31, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sehubungan dengan penyelenggara pendidikan formal, ketentuan tersebut mempunyai dampak terhadap penyediaan jumlah sekolah/ruang belajar. Maka masalah kependudukan perlu mendapatkan perhatian.

Kependudukan di Indonesia mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya disebutkan Sucipto (1978) ada lima, yaitu: jumlahnya yang sangat besar, pertumbuhannya yang masih tinggi, penyebarannya yang tidak merata, struktur yang masih muda dan sifat-sifat sosial ekonomi yang mencerminkan keterbelakangan.

Kelima karakteristik kependudukan di Indonesia jelas hubungannya dengan pengadaan sekolah, penempatan jumlah maupun penempatan lokasinya. Dari struktur umur yang masih muda akan dapat disimpulkan jumlah anak usia sekolah tinggi, demikian pula pertumbuhan penduduk yang masih tinggi mengakibatkan bahwa sekiranya pun pada suatu saat semua anak usia sekolah telah tertampung, namun tetap diperlukan peningkatan jumlah sekolah. Jumlah sekolah setiap tahun harus ditambah, apabila setiap tahun peningkatan jumlah penduduk itu mencapai sekitar 2,5 %.

Yang patut diperhitungkan ialah bahwa peningkatan jumlah sekolah berkaitan dengan faktor kependudukan di atas, tidak hanya menyangkut peningkatan jumlah ruang belajar, tetapi mencakup juga persoalan peningkatan jumlah guru. Itulah sebabnya masalah pendidikan guru, sangat penting dalam kaitannya dengan peningkatan jumlah sekolah itu.

### III. Struktur Masyarakat Dalam Kaitannya dengan Pendidikan

Dalam sosiologi pendidikan, masalah struktur masyarakat perlu diperhatikan benar. Betapapun martabat umat manusia pada dasarnya sama, namun kenyataan menunjukkan adanya berbagai tingkat atau lapisan dalam masyarakat itu: ada golongan atas (elit), golongan menengah dan rendah. Bahkan menurut suatu penelitian, di Amerika Serikat sendiri, yang mencanangkan dirinya sebagai negara

demokratis, terdapat beberapa lapisan masyarakat. Pelapisan masyarakat itu mungkin disebabkan "darah biru" (ningrat dan jelata), mungkin pula disebabkan faktor ekonomis (kaya-miskin). Kedudukan seseorang dalam tangga masyarakatnya tidak sedikit mempengaruhi pola pemikirannya, juga mengenai pendidikan, sikap dan tingkah lakunya.

Havighurst (1979) menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan dan sekolah pada berbagai masyarakat tersebut berbeda. Lapisan teratas memandang pendidikan lebih sebagai peningkatan pribadi daripada sebagai persiapan untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Bagi lapisan menengah-atas pendidikan itu sangat penting bagi perolehan dan pemantapan kariernya, dan tidak sedikit dari mereka dapat mencapai lapisan menengah-atas ini dengan bermodalkan pendidikan yang baik/ juga lapisan menengah-bawah memandang sekolah sebagai esensial untuk mendapatkan pekerjaan dan atau jabatan yang baik dan oleh karena itu perhatian mereka terhadap pendidikan sangat besar. Sedangkan lapisan rendah memandang pendidikan memang perlu, akan tetapi sering perhatian terhadap sekolah itu terdesak oleh pencaharian kehidupan sehari-hari, sehingga lapisan ini menunjukkan jumlah putus sekolah yang relatif besar.

Di Indonesia adanya pelapisan masyarakat itu dikemukakan oleh berbagai

pihak. Pada masa sebelum perang kemerdekaan, pelapisan ini lebih berdasarkan ras. Kaum penjajah, untuk mengukuhkan kedudukan di atas kaum pribumi, berhasil menempatkan dirinya di tingkat teratas, sedangkan penduduk bumi putera ditempatkan pada lapisan terbawah. Sedangkan di antara kedua bangsa ini, di antara bangsa penjajah dan bangsa bumiputera Indonesia, ditempatkan ras "timur-asing" (Cina, India, Arab) sebagai lapisan menengah. Dengan lapisan terjajah terdapat batas yang jelas.

Hal ini akan ditemukan jelas dampaknya dalam sistem pendidikan masa itu. Secara resminya sistem pendidikan masa itu dibagi dua jalur berdasarkan besar dan fasilitas yang lengkap. Sedangkan untuk pendidikan dalam jalur bumiputera, hanya terbatas untuk tingkat pengajaran rendah, serta anggaran dan fasilitas yang minim. Sehingga walaupun ada dari golongan bumiputera yang berhasrat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, maka mereka harus menempuh di Eropa, akan tetapi untuk memilih jalur ini diadakan seleksi yang ketat dan sangat sulit ditembus. Dengan demikian, pergeseran dari lapisan bawah ke lapisan menengah melalui pendidikan sangat sulit. Pada umumnya yang berhasil menembus pelapisan itu ialah 'golongan priyayi, yang memang menduduki lapisan

yang setingkat lebih tinggi dari golongan terendah "wong cilik".

Proklamasi kemerdekaan membawa perubahan yang sangat besar dalam masalah struktur masyarakat ini. Sudah barang tentu orang Belanda tidak dapat lagi mempertahankan posisi tempatnya yang teratas dalam struktur masyarakat Indonesia. Dan struktur masyarakat itu tidak lagi didasarkan pada ras. Lapisan tertinggi cenderung diduduki oleh para pejabat tinggi karena yang kedudukannya mendapat kehormatan yang tinggi pula. Juga mereka yang berkedudukan ekonomi kuat dapat digolongkan ke dalam lapisan tinggi ini.

Salah satu hal yang sangat menonjol dirasakan sebagai hasil kemerdekaan ialah perkembangan pendidikan yang sangat pesat, serta keterbukaannya bagi seluruh lapisan masyarakat, ditambah lagi dengan diberikannya beasiswa bagi jenis pendidikan tertentu. Hal ini menyebabkan lebih banyak pihak yang berkesempatan mengenyam pendidikan, berlainan dengan zaman penjajahan Belanda di mana hanya pihak tertentu saja yang berkesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai. Dengan perkembangan pendidikan seperti itu muncullah suatu lapisan tertentu, lapisan cendekiawan, yang di antara jutaan orang yang kurang atau tidak mendapat pendidikan, memperoleh suatu kehormatan khusus dalam masyarakat. Terjadilah pergeseran dari pelapisan

yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Tidak sedikit orang yang termasuk dalam lapisan menengah sekarang ini mendapatkan statusnya melalui usaha sendiri, atau dalam peristilahan sosiologi disebut *achieved status*.

Adapun lapisan bawah mencakup para buruh dan petani kecil. Faktor sosial ekonomis menyebabkan mereka lebih banyak mencurahkan perhatian terutama bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mendesak ke belakang perhatian mereka terhadap pendidikan (formal), sehingga tidak sedikit yang mengalami putus sekolah.

#### IV. MASALAH GERAK MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN

Masyarakat Indonesia lebih-lebih dewasa ini, bukanlah masyarakat yang diam atau statis, melainkan sangat dinamis. Banyak hal yang mendorong dinamika masyarakat ini. Di samping jiwa merdeka yang meresapi bangsa Indonesia dewasa ini, juga kemajuan ilmu dan teknologi mendorong hal ini. Gerak masyarakat atau mobilitas masyarakat ini-seperti dapat dipelajari dalam ilmu masyarakat atau sosiologi menunjukkan dua arah : mendatar (horizontal) atau menegak (vertikal).

Gerak mendatar misalnya dapat ditimbulkan oleh perpindahan penduduk. Urbanisasi dan transmigrasi merupakan dua contoh dari gerak masyarakat yang mendatar ini. Setiap perpindahan penduduk itu akan menuntut pula

fasilitas di bidang pendidikan. Perhatikan saja pembukaan pemukiman baru. Banyaknya anak di tempat yang baru itu menuntut adanya sekolah di mana anak-anak itu dapat belajar.

Hal itu baru dalam bidang pendidikan formal. Dalam bidang pendidikan informalpun tidak sedikit akibat yang dapat ditimbulkan perpindahan penduduk, baik urbanisasi, emigrasi, atau transmigrasi dan pembauran yang wajar dan harmonis, sehingga dapat menghindarkan tegangan-tegangan yang mungkin timbul karena perbedaan adat kebiasaan dan sistem nilai yang dianut masing-masing karena perbedaan subkulturnya. Dan langkah pendidikan dapat membantu banyak dalam mengurangi atau menghilangkan ketegangan tersebut.

Adapun gerak menegak atau vertikal yang secara selintas telah disinggung dalam membicarakan struktur masyarakat, yaitu bahwa dengan terbukanya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, ditambah lagi dengan bea siswa untuk jenis pendidikan tertentu dan bea siswa bagi anak-anak berbakat dan anak-anak dari lingkungan sosio-ekonomis yang dipandang perlu dibantu (misalnya bea siswa Supersemar) memberikan kemungkinan luas bagi yang bersangkutan untuk menaik dalam tangga masyarakat. Alam kemerdekaan menyebabkan pengisian jabatan-jabatan tidak lagi didasarkan pada status sosial seperti pada zaman

penjajahan yang memanfaatkan feodalisme, melainkan didasarkan pada kemampuan yang bersangkutan dengan semboyan "orang yang tepat untuk jabatan yang tepat" (the right man on the right place). Pendidikan memang merupakan jembatan untuk meraih peranan sebagai "orang yang tepat" to the right man itu. Seperti dikemukakan, perolehan status melalui pendidikan seperti itu disebut *achieved status*, berbeda dengan perolehan status karena *assigned status*, yaitu status atau gelar yang diberikan kepada seseorang karena jasanya yang luar biasa kepada negara.

Pergeseran seseorang dalam status seperti ini membawakan pula pengaruh terhadap pemikiran dan pendapatnya mengenai pendidikan. Mereka yang karena pendidikan telah mendapatkan suatu *achieved status* seperti itu cenderung menempatkan anaknya dalam pusat perhatiannya, sehingga hal ini dapat pula memberikan dampaknya pada pengadaan dan pengayaan sekolah.

#### V. FAKTOR EKONOMI

Anggaran dan fasilitas, sebagai komponen dari sistem pendidikan turut menentukan pelaksanaan pendidikan. Sarana dan anggaran tersebut didapatkan dari masyarakat pendidikan. Pemerintah yang sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar adalah penyelenggara dan salah satu pihak penanggung jawab pendidikan. Patut dicatat, bahwa

pembiayaan pendidikan itu tidak hanya dipikul oleh Departemen Pendidikan Nasional, melainkan beberapa departemen dan lain pun turut memberikan sahamnya. Dari anggaran rutinnya Departemen Pendidikan Nasional membiayai sekolah menengah dan tinggi serta gaji gurunya, demikian pula sekolah bersubsidi dan sekolah berbantuan. Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur, membiayai sekolah dasar, termasuk gaji guru. Departemen Agama menyediakan baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan pendidikan guna membiayai madrasah negeri maupun sebagian bantuan bagi madrasah swasta, Institut Agama Islam Negeri beserta guru dan dosennya. Untuk pengadaan dan peningkatan pegawainya, berbagai departemen juga menyediakan anggaran tertentu untuk penyelenggaraan pendidikan. Para penanggung jawab lainnya pun, yaitu para orang tua dan masyarakat, turut memberikan sahamnya dalam penyediaan pembiayaan dan sarana pendidikan itu.

Anggaran untuk pendidikan terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Akan tetapi dalam prakteknya untuk bidang pendidikan yang ditandai dengan kegiatan baru, pemisahan antara keduanya memang sulit. Hal ini dikemukakan Beeby (1981). Sebagai contoh dikemukakannya bahwa suatu kegiatan baru tidak mungkin diterapkan dalam keseluruhan sistem pendidikan tanpa diadakan perubahan dalam sistem

pendidikan guru, pengawasan, ujian, pengadaan peralatan dan bahkan juga perubahan gedung. Ini semua memerlukan pembiayaan segera, diambilkan dari anggaran rutin.

Anggaran pendidikan untuk sebagian diperlukan pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan. Beeby (1981) yang mendasarkan penulिसannya pada penelitian antara tahun 1970 - 1972, mengemukakan, bahwa meskipun hanya 50% dari gedung sekolah bersifat permanen, namun ruangan pada umumnya telah terlindung dari cuaca terik matahari. Sejak saat itu pembangunan dan pengembangan gedung-gedung sekolah terus ditingkatkan.

Untuk menyeragaman mutu pendidikan telah diadakan Proyek pengadaan buku teks, baik untuk tingkat SD maupun SL dalam berbagai bidang studi.

Di luar pendidikan formal seperti disinggung di atas, terdapat pula berbagai prasarana dan sarana, bagi pendidikan informal maupun formal, yang disediakan oleh berbagai pihak. Departemen Agama menyediakan atau membantu mengembangkan bangunan-bangunan yang ada kaitannya dengan pendidikan agama, seperti pesantren, gedung da'wah, vihara dan sebagainya. Departemen sosial (dulu) mencurahkan perhatian bagi penyediaan panti-panti asuhan, Lembaga Sosial Desa dan sebagainya. Departemen Penerangan (dulu) turut serta dalam pendidikan masyarakat dengan melalui

Radio, TV, dan filmnya (misalnya melalui program "Siaran Pedesaan"). Klompencapir.

Tidak pula dapat dilupakan pembinaan watak dan bakat remaja dalam bidang olah raga dan seni, yang diimbangi dengan pembangunan gedung olahraga maupun gedung kesenian, demikian pula Gelanggang Remaja merupakan prasarana yang sangat bermanfaat bagi pembinaan/ pendidikan generasi muda.

Di samping upaya dari instansi pemerintah, juga badan-badan swasta maupun perorangan tidak sedikit yang membangun prasarana dan sarana pendidikan itu, baik secara langsung maupun melalui kegiatan lain.

## VI. OUTPUT PENDIDIKAN

Seperti dikemukakan didepan, kecuali input pendidikan yang digali dari masyarakat, juga outputnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian pendidikan itu bukan sekedar jalan, melainkan diarahkan dan direncanakan bagi tersedianya manusia-manusia yang mempunyai kualifikasi selaras yang diperlukan masyarakat. Perencanaan pendidikan seperti itu sangat penting bagi terdapatnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya maka sebelum penyelenggaraan suatu pendidikan, hendaknya diadakan pengkajian atau penelitian yang seksama mengenai



kualifikasi manusia yang diperlukan masyarakat, baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala keluarga, sebagai tenaga kerja ataupun sebagai pimpinan. Kualifikasi tersebut meliputi pengetahuan atau aspek kognitif, keterampilan atau aspek psikomotor dan aspek sikap atau afektif.

Akan tetapi yang diharapkan bukan sekedar manusia-manusia yang menguasai "Technical know-how" melainkan manusia seutuhnya yang dapat mengabdikan diri sebagai manusia pembangunan sambil terus meningkatkan ketaqwaannya terhadap Tuhan.

Mengingat bahwa manusia yang diharapkan dicapai melalui pendidikan itu ialah pula manusia yang dapat dan mau aktif berpartisipasi dalam pembangunan ini, maka anggaran yang tersedia bagi pendidikan itu tidak terbuang sia-sia, sehingga pendidikan itu dapat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia.

Seperti dikemukakan di atas, pendidikan di Indonesia dalam segala bentuknya langsung dikaitkan dengan pembangunan dan merupakan salah satu sistem dari keseluruhan pembangunan masyarakat Indonesia tidak semata-mata ditujukan kepada pembangunan fisik, tetapi lebih kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai manusia pembangunan. Oleh karena itu pendidikan di Indonesia tidak hanya diarahkan kepada aspek tertentu saja dari

kepribadiannya, akan tetapi kepada manusia yang bertopang kepada Asas Perikehidupan dan keseimbangan, ialah :

Keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Pendidikan juga tidak diperintahkan bagi sekelompok manusia saja, akan tetapi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran" (UUD 1945).

Dengan demikian maka pendidikan di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia bahkan umat manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat agar benar-benar dapat layak sebagai manusia. Itulah sebabnya mengapa di Indonesia ini pendidikan diartikan sebagai "memanusiakan manusia".